BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Di era reformasi ini pemerintah yang ada di setiap Negara dituntut untuk dapat menunjukan kualitas yang semakin membaik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap Negara membutuhkan pemerintahan yang baik dan mampu mengemban tugas Negara. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, ataupun provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan

daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Di dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem akuntansi, yaitu satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun keuangan sebaik mungkin. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja daerah yang tepat di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang ditandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK), serta

memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun 2018 (www.bpk.go.id) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 menggambarkan kenaikan dari hasil opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggungjawab dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2016, tetapi terdapat 14 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih rendah 2 poin persen dari penurunan opini tahun 2016 sebesar 5% (25 dari 542 LKPD). Dan dari 14 LKPD tersebut salah-satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Namun, Badan Pemeriksaan Keuangan masih banyak menemukan kelemahan-kelemahan berkaitan dengan proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tejadi pada 387 pemerintah daerah. Salah satunya yang terjadi pada Pemeritah Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

1. Rekonsiliasi data pengajuan klaim yang telah diverifikasi dengan data pembayaran klaim yang telah disetor ke kas daerah tidak dilakukan.
2. *Stock opname* oleh pengurusan barang pembantu belum dilakukan secara berkala.

3. Perbedaan nilai penyertaan modal yang diakui BUMD dengan yang disajikan dalam LKPD, dan LK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Belitung Timur belum disusun sesuai dengan SAP.

BPK juga menemukan kelemahan yang terjadi pada satuan pengawas intern tidak optimal terjadi pada 137 pemerintah daerah dan permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 16 pemerintah daerah antara lain entitas tidak memiliki satuan pengawasan intern dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai (IHPS I 2018. www.bpk.go.id). Pada IHPS 1 2017, BPK juga menemukan permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2016, antara lain:

1. Saldo kas atas sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dicatat dan disajikan pada neraca secara wajar, antara lain terjadi pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Saldo kas di bendahara pengeluaran secara fisik tidak ditemukan keberadaannya, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, dan terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara dan belum dipertanggungjawabkan, antara lain terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Penyajian nilai persediaan tidak berdasarkan hasil perhitungan fisik akhir tahun dan *stock opname*, antara lain terjadi pada Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaannya/ belum divalidasi yang belum ditetapkan statusnya dan tidak

dapat ditelusuri perincian dan keberadaan fisik, kondisi aset serta status kepemilikannya, antara lain terjadi pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

5. Kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kekurangan volume fisik atau pemahalan harga pekerjaan yang belum seluruhnya dipulihkan pada belanja modal gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan, antara lain terjadi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan prosedur dari tahap awal pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri No.59 Tahun 2007). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) masih menganut prinsip dasar akuntansi pada umumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju.

Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, karena pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang penyusunanya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum

memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat di sebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan itu sendiri atau belum menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal dan atau peran auditor internal yang masih lemah. Fenomena di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yusniar *et. al.* (2016), sistem akuntansi pemerintahan kurang mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Kondisi ini kurang optimal yang mengakibatkan perlu adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Fenomena di atas juga didukung oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016), yang mengatakan bahwa keberadaan peran auditor internal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan, maka kualitas auditor internal perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik, apabila sumber daya manusia mempunyai kompetensi yang baik dalam menyusun laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kompetensi dasar manusia belum baik dalam menyusun laporan keuangan, maka kualitas dari laporan keuangan tersebut juga bisa di katakan belum baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sagara (2015), kompetensi sumber daya manusia merupakan penyebab utama buruknya kualitas pelaporan keuangan maka

diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini mengambil judul "**PENGARUH PERANAN INTERNAL AUDIT, IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**".

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah yang akan di teliti dan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh peranan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh implementasi sistem keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

I.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah maka penulis akan membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Penulis hanya memfokuskan kajian tentang lingkup dinas keuangan daerah yang terdapat di Kabupaten Belitung yang di wakili oleh Kepala bagian dan karyawan bagian

keuangan/akuntansi. Penggunaan laporan keuangan pemerintah menguraikan tentang peranan internal audit, implementansi sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh peranan internal audit pada kualitas laporan keuangan yang di buat oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi sistem keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka di harapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk:

1. Membantu instansi pemerintah daerah dalam rangka mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Membantu para investor maupun calon investor untuk melihat potensi pemerintah dilihat dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan secara umum dan pelaporan keuangan secara khusus pada Pemerintahan Daerah serta menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

I.6. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang relevan dan valid.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang akan dipakai dalam melakukan penelitian.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pelaksanaan dari hasil penelitian yang terdiri dari hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.